

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 188 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sub urusan bencana.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Strategis BPBD yang selanjutnya disebut Renstra BPBD adalah dokumen perencanaan BPBD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja BPBD yang selanjutnya disebut Renja BPBD adalah dokumen perencanaan BPBD untuk periode 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran BPBD yang selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan pada BPBD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

Pasal 2

Renja BPBD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan BPBD untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada rancangan Renstra BPBD Tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1) Renja BPBD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rancangan Renstra BPBD Tahun 2025-2029 yang akan digunakan BPBD untuk melaksanakan rencana kerja BPBD.
(2) Renja BPBD Tahun 2026 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja BPBD tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan BPBD;
    b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antara Renja BPBD dengan dokumen RKPD dan Renstra BPBD;
    c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran BPBD yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
    d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) Renja BPBD digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA BPBD.

(2) Renja BPBD selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra BPBD Tahun 2025-2029.

BAB II
DOKUMEN RENJA BPBD

Pasal 5

(1) Isi dan uraian dokumen Renja BPBD Tahun 2026 disusun dengan sistematika:
   a. bab I latar belakang dan dasar hukum;
   b. bab II hasil evaluasi Renja BPBD tahun lalu;
   c. bab III tujuan dan sasaran;
   d. bab IV rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
   e. bab V penutup; dan
   f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Isi dan uraian dokumen Renja BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA BPBD

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja BPBD menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja BPBD meliputi:

a. semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab BPBD sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD;
b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUAPPAS yang telah disepakati bersama DPRD;

c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara BPBD dengan DPRD; dan

d. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja BPBD.

Pasal 7

(1) BPBD membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja BPBD.

(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja BPBD disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(4) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/atau perubahan Renja BPBD tahun berjalan.

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik.

(6) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Kepala BPBD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BPBD dan evaluasi hasil Renja BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan BPBD terhadap pelaksanaan dan hasil Renja BPBD.

(3) Kepala BPBD menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja BPBD.

(4) Pengendalian pelaksanaan Renja BPBD dilakukan pada saat penyusunan RKA BPBD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA BPBD

Pasal 9

(1) Renja BPBD dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 8; dan
   c. terdapat adanya penyesuaian tujuan dan sasaran BPBD beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra BPBD Tahun 2025-2029.

(2) Perubahan Renja BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari:
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja BPBD tahun 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 188



KAJIAN SINGKAT RENJA TAHUN 2026

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jln. Raya Soreang KM. 17 Telp./Fax (022) 85872591 Soreang 40911
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, *E-mail : bpbdkabbandung@gmail.com*
http://bpbd-kabbandung.blogspot.com

SURAT PERINTAH
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 800.1.11.1/735/Sekre
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah merupakan hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya dan berapa sumberdaya yang akan digunakan serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya kebencanaan ;

b. bahwa agar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel rencana kerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan RENJA;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026, yang terdiri dari ketua tim, sekretaris dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.

Mengingat :

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;

6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.5.15-3604 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;

KETIGA : Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung bertugas menghimpun bahan-bahan dan menyusun Rencana Kerja (RENJA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Soreang
Pada tanggal, 10 Juni 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung



Drs. UKA SUSKA PUJI UTAMA, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670914 199501 1 001

Tembusan Yth :
1. Bapak Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Kabupaten Bandung;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN I : Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung
Nomor : 800.1.11.1/735/Sekre
Tanggal : 7 Juni 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026

Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja
Badan penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung
Tahun 2026

No	Daftar Telampir
1	Drs. H. UKA SUSKA PUJI UTAMA M.Si 196709141995011001 Pembina Utama Muda - IV/c Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pembina
2	HENDRA HIDAYAT S.Sos, M.Si 197008251992031007 Pembina - IV/a Sekretaris Bpbd Sekretariat Bpbd Anggota
3	DADAN SH 197205041998031008 Penata Tingkat I - III/d Perencana Ahli Muda Sekretariat Bpbd Anggota
4	BENY SONJAYA SE 197104292008011004 Pembina - IV/a Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik Anggota
5	DIKI SUDRAJAT S.T., M.Si. 197407122008011005 Penata Tingkat I - III/d Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Anggota
6	Hj. DEWI HARTATI S.E., M.Si. 198207152010012010 Penata Tingkat I - III/d Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian/PLT Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi Anggota
7	DEWI SRI PURWANTI ST 198305072009012006 Penata Tingkat I - III/d Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Anggota

8	ASEP MAHMUD A.Md 197309011994031005 Penata - III/c Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Bidang Kedaruratan Dan Logistik Anggota
9	ENDOY SUBANA S.E. 196707092007011006 Penata Muda Tingkat I - III/b Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Bpbd Anggota
10	BEBEY BAIDILLAH YUSUF A.Md 198003232014121002 198003232014121002 Penata Muda - III/a Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Bpbd Anggota
11	ISANG ELLY BUDHI RAHAYU S.M. 197203292007011006 Penata Muda - III/a Pengolah Data Dan Informasi Subbagian Umum Dan Kepegawaian Anggota
12	SUMIATI S.E. 199005282019032004 Penata Muda Tingkat I - III/b Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Bpbd Anggota
13	TAUFIK ABDURRAHMAN A.Md. 199403302024211002 - VII Arsiparis Terampil Sekretariat Bpbd Anggota
14	CECILLE MEITA SUSANTI S.Ak 200105172025052001 Penata Muda - III/a Perencana Ahli Pertama Sekretariat Bpbd Anggota
15	CANDRA PURNAMA A.Md 199101142025211002 - VII Pengelola Layanan Operasional Subbagian Umum Dan Kepegawaian Anggota
16	JAJANG GUNAWAN S.Sos 197810052008011005 Penata Muda Tingkat I - III/b Penata Layanan Operasional Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Anggota
17	HERIYADI S.H. 197607082008011001 Penata Muda - III/a Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Bpbd Anggota

18	EVI METI SULISTIOWATI S.Sos 198605132019032003 Penata Muda Tingkat I - III/b Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Anggota
19	ABDUROCHMAN S.Sos. 198910062020121001 Penata Muda Tingkat I - III/b Penata Layanan Operasional Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Anggota
20	KHADAPY NURHUDA S.Sos. 199401272022031009 Penata Muda - III/a Penata Layanan Operasional Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Anggota
21	FELIX PRAMUDITA TEJA S.Psi 198906162023211011 - IX Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Anggota
22	ARIE SUSILANDARI SKM 198309162024212003 - IX Analis Kebencanaan Ahli Pertama Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Anggota
23	RIDWAN MAULANA S.T. 199309032024211003 - XI Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Anggota
24	WAHYU SATIA S.Sos 197709072007011003 Penata - III/c Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Kedaruratan Dan Logistik Anggota
25	SATRIO BUDI PRATAMA S.T. 199402222020121002 Penata Muda Tingkat I - III/b Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Kedaruratan Dan Logistik Anggota
26	UWOH HIKMAT 197004072009011002 Pengatur Tingkat I - II/d Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Bpbd Anggota
27	RITA SAHARA S.Sos 197210052024212003 - IX Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Bidang Kedaruratan Dan Logistik Anggota

28	SUPARTINI S.Sos 197008022024212001 - IX Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Bidang Kedaruratan Dan Logistik Anggota
29	MUKSIN ALATAS S.KM 197610042025211012 - IX Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Bidang Kedaruratan Dan Logistik Anggota
30	DANI RAMDHANI 198505242025211003 - V Operator Layanan Operasional Bidang Kedaruratan Dan Logistik Anggota
31	ASEP SUDRAJAT 196902052000031001 Penata Muda Tingkat I - III/b Pengolah Data Dan Informasi Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Anggota
32	TATANG SURYANA S.Sos. 197009022007011011 Penata Muda Tingkat I - III/b Analis Kebencanaan Ahli Pertama Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Anggota
33	SHINTYA RIZKAYANI S.Psi 199601042022032014 Penata Muda - III/a Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Anggota
34	DADANG GUNAWAN 198010102009011011 Pengatur Tingkat I - II/d Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Bpbd Anggota
35	BEBET ZAELANI SOLIHIN S.T. 198207092024211002 - IX Analis Kebencanaan Ahli Pertama Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Anggota
36	HUDA IMAN AZHARI ST. 199303102024211004 - IX Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Anggota
37	SANDI SUTISNA 19790730 201001 1 005 Pengatur Tingkat I - II/d Pengolah Data dan Informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian

38	GILANG FAJAR RAMADHAN S.KOM NON ASN Operator
39	Dadan Ramdani NON ASN Operator

ditetapkan di Soreang
Pada tanggal, 10 Juni 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung

Drs. UKA SUSKA PUJI UTAMA, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670914 199501 1 001

KATA PENGANTAR



Kabupaten Bandung yang memiliki kondisi geografis berupa dataran tinggi berbentuk cekungan dikombinasikan dengan banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi dapat menyebabkan tingginya sedimentasi dan bencana banjir. Kabupaten Bandung juga berisiko mengalami bencana lainnya antara lain gempa bumi, gerakan tanah, longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan dan wabah penyakit lain seiring terjadinya bencana.

Penanggulangan bencana terdapat beberapa tahapan diantaranya pencegahan dan kesiapsiagaan, penanggulangan kedaruratan pada saat kejadian, dan penanganan penanggulangan pada paska bencana, hal ini sudah menjadi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.

BPBD memiliki aspek operasional penanggulangan bencana yang beriringan dengan aspek perencanaan yang mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 yang kemudian dijelaskan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Imendagri 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Kemudian Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3604 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kodefikasi Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdapat 3 tahapan yang tediri dari tahap persiapan penyusunan Rencana Kerja , tahap penyusunan Rencana Kerja, dan tahap penetapan Rencana Kerja. Penyusunan Rencana Kerja BPBD Tahun 2026 dijadikan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat menjaga konsistensi dan sinergitas program dan perangkat darah dalam pembangunan daerah. Program prioritas dan isu-isu Pemerintah Daerah serta langkah langkah yang diperlukan dapat diimplementasikan pada Rencana Kerja agar dapat tepat sasaran, optimal, dan lebih bermanfaat bagi perangkat daerah dalam mendorong pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan *Good Governance* BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2026 dalam prosesnya melakukan upaya meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2026 dengan program serta kegiatan yang menjadi penunjang dalam melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri dari pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 yang telah disusun ini diharapkan dapat dicapai secara optimal dan semakin dapat tepat sasaran dan bermanfaat baik bagi perangkat daerah dan masyarakat.

Soreang, 14 Juli 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung

Drs. H. UKA SUSKA PUJI UTAMA, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670914 199501 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR……...…….	**i**
DAFTAR ISI……...…….	**iii**
DAFTAR GAMBAR……..	**v**
DAFTAR TABEL……...	**vi**
BAB I PENDAHULUAN……...….	**7**
1.1 Latar Belakang…….....	7
1.2 Landasan Hukum……..……	8
1.3 Maksud dan Tujuan……..…….	10
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Awal…..……..…….	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024	**14**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD 2024…….	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja PD…….....	38
2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi……...	40
2.4 Review terhadap RKPD…….	45
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……..…..	69
2.6 Capaian SPM Tahun 2024…….	69
2.7 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) BPBD Tahun 2024……..	73
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN……..…	**79**
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional…….....	79
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD .....…….....	79
3.3 Program dan Kegiatan.....	94
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD……..……...…	**95**
4.1. Target Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	117
4.2. Target Kinerja Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs).....	119
BAB V PENUTUP……...	**124**
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Halaman

BAB II

Gambar 2.3.1 **P**rofil Demografi Pegawai BPBD Tahun 2024…… 40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Capaian Kinerja Tahun 2024….....	15
Tabel 2.1.2	Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024….....	17
Tabel 2.1.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021-2026 Kabupaten Bandung….....	18
Tabel 2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Bandung....	39
Tabel 2.3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD…….	41
Tabel 2.4.1	Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Bandung….....	47
Tabel 2.6.1	Laporan Evaluasi Kinerja Penerapan SPM Tahun 2025.....	69
Tabel 2.7.1	Capaian dan Target SDG's TPB : Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun) Tahun 2024….....	75
Tabel 2.7.2	Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SDG's : Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun)….....	76
Tabel 2.7.3	Capaian dan Target SDG’s TPB 11 : Kota Dan Komunitas Berkelanjutan ("Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif. Aman. Tangguh dan Berkelanjutan) Tahun 2025….....	77
Tabel 2.7.4	Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SDG’s TPB 11 : Kota Dan Komunitas Berkelanjutan ("Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif. Aman. Tangguh dan Berkelanjutan)……	77
Tabel 3.2.1	Tabel, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan BPBD….....	83
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Kerja Prubahan dan Pendanaan BPBD Tahun 2025 Kabupaten Bandung….....	100
Tabel 4.1.1	Target Kinerja Pelaksanaan SPM Tahun 2025-2030….....	117
Tabel 4.2.1	Indikator SDGs Pada BPBD Kab. Bandung….....	120
Tabel 4.2.2	Target SDG's TPB 1 : Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun) Tahun 2024…	122

Tabel 4.2.3 Target TPB : Kota dan Komunikasi Berkelanjutan (Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif Aman. Tangguh dan Berkelanjutan) Tahun 2025-2030…..... 123

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Rancangan Rencana Kerja PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung tahun 2026 telah di tetapkan melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja PD yang selanjutnya menjadi pedoman untuk penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Ranwal Renja) Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung tahun 2026 merupakan dokumen rencana pembangunan 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Hal ini juga untuk mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Penyusunan Dokumen Renja ini, BPBD melakukan pemetaan dari Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.151.3604/2024 Tahun 2024 Tentang Pemutakhiran Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen rencana pembangunan terkait serta hasil identifkasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Bandung, maka dibutuhkan perumusan visi pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pedoman arah kebijakan lima tahun mendatang. Visi ini dibuat untuk menentukan focus dan arah gerak

Pemerintah Kabupaten Bandung dalam bekerja menuntaskan isu isu yang ada dan meminimalisasi potensi permasalahan di masa mendatang. Visi Pemerintah Kabupaten Bandung adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas, Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung adalah melaksanakan misi ke-4 (Keempat) yaitu **“4. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan”.**

Untuk mendukung misi ini, aspek kebencanaan merupakan salah satu komponen yang perlu diakomodir dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut didasari oleh kondisi Kabupaten Bandung yang memiliki beberapa potensi bencana. Meninjau historis kebelakang, beberapa bencana cenderung tidak dapat dihindarkan dan mengganggu stabilitas pembangunan. Mitigasi berupa pencegahan terjadinya bencana tidak akan menghilangkan seluruh resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya terkait penanganan aspek kebencanaan selain mengakomodir upaya mitigasi perlu pula untuk diarahkan pada upaya adaptasi berupa rekayasa infrastruktur dan fasilitas publik agar memiliki kepentingan terhadap bencana.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan dengan memperhatikan program, strategi dan arah kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 adalah:

13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

14. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3604 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
30. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 99 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 99);
31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);
32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Dokumen Rencana Kerja BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2026 adalah untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi BPBD Kabupaten Bandung pada tahun 2026 serta terciptanya sinergitas

dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penanganan penanggulangan kebencanaan di wilayah Kabupaten Bandung

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bancana Daerah Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2026;
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan dari penjabaran Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2026;
3. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
4. Sebagai pedoman / arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Rancangan Renja PD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

1.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu



Rencana Kerja BPBD Kabupaten Bandung adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bandung. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BPBD Kabupaten Bandung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bandung selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bandung beserta target dan capaian realisasinya. Hasil sebagaimana tersebut diatas, dapat kami sampaikan dan jelaskan berdasarkan indikator kegiatan yang terdapat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1.1
Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	Target	Realisasi	Capaian (Persentase)
1	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penangulangan bencana	1. Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,56	0,68	121.42
			2. Persentase peningkatan pelayanan kepada warga masyarakat yang terkena dampak bencana	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Keterntraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1 Nilai SAKIP	74	80,30	108,51
			2 Nilai IKM	78	89,87	115,22
			3. Pesentase BMD Kondisi Baik	90%	94,93	105,47

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja

1. Evaluasi Program Tahun 2024

Anggaran BPBD pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. **15.199.355.456** (Lima Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh

Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) terealisasi sebesar Rp. **14.373.885.174** (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) atau pencapaian **94,57%,** dengan rincian belanja sebagai berikut :

a) **Belanja Operasi** sebesar Rp**. 13.985.936.506** (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. **13.198.432.674** (Tiga Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) atau pencapaian **94,37%;**
b) **Belanja Modal** sebesar Rp. **1.213.418.950** (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. **1.175.452.500** (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) atau pencapaian **96.87%.**

Adapun untuk anggaran realisasi belanja program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD kabupaten Bandung, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.2
Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran Rp
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**- Nilai SAKIP - Nilai IKM**	**10.988.739.813**	**10.408.167.949**	**94,72**	**580.571.864**
		Persentase Aset BMD dalam kondisi baik				
1.05.03	**Program Penanggulangan Bencana**	**Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana**	**4.210.615.643**	**3.965.717.225**	**94,18**	**244.898.418**
		Program 1	**10.988.739.813**	**10.408.167.949**	**94,72**	**580.571.864**
		Program 2	**4.210.615.643**	**3.965.717.225**	**94,18**	**244.898.418**
		Program 1 + 2	**15.199.355.456**	**14.373.885.174**	**94,57**	**825.470.282**

Pada Tabel diatas dievaluasi dalam bentuk realisasi anggaran. Selanjutnya, pada **Tabel T-C.29** menjelaskan capaian akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1.3

Tabel T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021-2026

Kabupaten Bandung

Nama PD : BPBD

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1	05	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Nilai IKM	Poin Poin	70 75	Poin Poin	77,65 80,04	Poin Poin	74 78	Poin Poin	80,30 89.87	108,51 115,22	Poin Poin	83,5 77,70	Poin Poin	91,94 -	46.19 -
						BMD Kondisi Bauj	Persentase	80	Persentase	48,64	Persentase	90	Persentase	95.14	105,71	Persentase	90	Persentase		19.08
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggara	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	300	300,00	Persen	100	Persen	80	80.00

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Perangkat Daerah	**n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**														
1	05	01	2.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	6	60,00	Dokumen	6	Dokumen	3	50.00
1	05	01	2.01	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	6	60,00	Dokumen	2	Dokumen	2	100.00

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	01	2.01	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	6	60,00	Dokumen	2	Dokumen	2	100.00
1	05	01	2.01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	10	100,00	Dokumen	5	Dokumen	5	100.00

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1. Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu 2. Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**300**	**300,00**	**Persen**	**100**	**Persen**	**50**	**50**
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	Bulan	14	Orang/ Bulan	27	Orang/ Bulan	53	49,07	Orang/ Bulan	27	Orang/ Bulan	54	200

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	3	Laporan	10	83,33	Laporan	3	Laporan	1	33.33
1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Persen**	**100**	**Persen**	**20**	**20.00**
1	05	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Laporan	5	Laporan	1	20.00

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**300**	**300,00**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**100.00**
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Stell	80	Stell	80	Paket	100	Paket	260	260,00	Paket	100	Paket	100	100.00
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	0.00
1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	0.00

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan operasional perkantoran Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai**	**Persen**	**100**	**Persen**	**80,4**	**Persen**	**100**	**Persen**	**180**	**180,40**	**Persen**	**100**	**Persen**	**77.77**	**77.77**
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	13	Jenis	11	Paket	15	Paket	40	66,67	Paket	15	Paket	12	80
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit	8	Unit	8	Paket	8	Paket	27	67,50	Paket	8	Paket	8	100
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	5	Jenis	5	Paket	5	Paket	25	100,00	Paket	0	Paket	0	0

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	jenis	6	jenis	6	Paket	1	Paket	7	175,00	Paket	2	Paket	1	50
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	Paket	6	Paket	12	40,00	Paket	6	Paket	6	100
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	jenis	4	jenis	2	Dokumen	4	Dokumen	10	50,00	Dokumen	4	Dokumen	1	25
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	HOK	500	HOK	400	Laporan	1	Laporan	858	21.450,00	Laporan	0	Laporan	0	0

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	HOK	250	HOK	200	Laporan	1	Laporan	601	15.025,00	Laporan	1	Laporan	0	0
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**100,00**	**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**0**
1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	Unit	1	Unit	1	#DIV/0!	Unit	0	Unit	0	0
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	0

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						yang Disediakan														
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	Unit	1	Unit	1	#DIV/0!	Unit	0	Unit	0	0
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	0
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**Persen**	**100**	**Persen**	**85,68**	**Persen**	**100**	**Persen**	**226**	**225,64**	**Persen**	**100**	**Persen**	**50**	**50**
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Buah	4.5	Buah	4.889	Laporan	1	Laporan	8.415	210.375,00	Laporan	1	Laporan	0	0

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	Bulan	12	Laporan	1	Laporan	25	625,00	Laporan	12	Laporan	6	50
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	OB	1416	OB	1416	Laporan	1	Laporan	2.888	72.200,00	Laporan	12	Laporan	6	50
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Kpemenuhan Barang Milik Daerah Layak Pakai**	**Persen**	**100**	**Persen**	**55,55**	**Persen**	**100**	**Persen**	**203**	**202,68**	**Persen**	**100**	**Persen**	**40**	**40**

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	14	Unit	11	Unit	14	Unit	150	214,29	Unit	0	Unit	0	0
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	Unit	9	Unit	23	Unit	67	58,26	Unit	37	Unit	13	35.13514
1	05	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	0
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	Unit	1	-	1	25,00	-	0	-	0	0

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	2	Jenis	2	Unit	2	Unit	13	130,00	Unit	2	Unit	2	100
1	05	01	2.09	00 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	-	0	Kali	19	76,00	Kali	0	Kali	0	0
1	05	01	2.09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	1	Paket	1	Unit	1	Unit	3	60,00	Unit	1	Unit	1	100

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Permendagri 18 tahun 2020) 2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Permendagri 18 tahun 2020) 3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pcnyelamatan	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	300	300,00	Persen	100	Persen	57.8	57.8

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						dan evakuasi korban bencana (Permendagri 18 tahun 2020) 4. Persentase Pelaksanaan Koordinasi dalam Penanganan Pasca Bencana															

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal 2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana (Permendagri 18 Tahun 2020)	Orang	386.272	Orang	386.272	Orang	750	Orang	1.136.940	37,28	Orang	500,000	Orang	214924	42.98

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Persen	100	Persen	100	Orang	750	Orang	750.2	24,60	Orang	1	Orang	0	0.00
1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan	Persen	100	Persen	0	Dokumen	1	Dokumen	101	10.100,00	Dokumen	500,000	Dokumen	214924	42.98

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun														

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/ legal 2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal 3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan 4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan 5. Persentase warga negara yang mendapat layanan	Orang	356.146	Orang	356.146	Orang	700	Orang	1.056.416	37,07	Orang	250,000	Orang	203148	81.26

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana 6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan (Permendagri 18 Tahun 2020)														

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	0	0
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara Keluarga maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	N/A	N/A	N/A	N/A	Unit	3	Unit	3	25,00	Unit	0	Unit	0	0

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Persen	100	Persen	100	Orang	200	Orang	500	62,50	Orang	3	Orang	0	0
1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	0	0

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Desa	2	Desa	2	N/A	N/A	Desa	5	125,00	Desa	1	Desa	0	0
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki	Desa	2	Desa	2	N/A	N/A	Desa	5	125,00	Desa	0	Desa	0	0

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana														
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	0	0

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	Dokumen	1	Dokumen	0	#DIV/0!	Dokumen	4	Dokumen	0	0
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan	Persen	100	Persen	100	Dokumen	1	Dokumen	201	5.025,00	Dokumen	200	Dokumen	0	0

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						tempat tinggalnya														
1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	0	0
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan	N/A	N/A	N/A	N/A	Orang	120	Orang	120	25,00	Orang	2	Orang	0	0

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana														
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB 2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana**	**Orang**	**49.819**	**Orang**	**49.819**	**Orang**	**250**	**Orang**	**300.036**	**28,57**	**Orang**	**170,000**	**Orang**	**113,770**	**66.92**

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana (Permendagri 18 Tahun 2020)														
1	05	03	2.03	00 01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	N/A	N/A	N/A	N/A	Laporan	0	Laporan	0	#DIV/0!	Laporan	1	Laporan	0	0

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	- SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	N/A	N/A	N/A	N/A	Dokumen	1	Dokumen	0	0,00	Dokumen	1	Dokumen	0	0
						- Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	300	300,00	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A
1	05	03	2.03	0003	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan Ditolong dan Dievakuasi Per	Persen	100	Persen	100	Orang	100	Orang	100.2	25,05	Orang	100,000	Orang	77.48	77.48

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Jenis Kejadian Bencana														
1	05	03	2.03		Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dokumen	0	Dokumen	0	0
1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Orang	50	Orang	139	278

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	03	2.03	00 09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jenis	6	Jenis	6	Orang	100	Orang	100.011	25,00	Orang	70,000	Orang	36,292	51.85
1	05	03	2.03	00 10	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	N/A	N/A	N/A	N/A	Dokumen	0	-	0	#DIV/0!	Dokumen	0	Dokumen	0	0.00

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	Laporan	0	-	0	#DIV/0!	Laporan	1	Laporan	1	100.00
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**1. Jumlah Dokumen Regulasi yang tersusun 2. Jumlah Sistem informasi yang aktif dan terintegrasi 3. Jumlah Peserta Pelatihan SDM kebencanaan**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**0**	**300**	**300,00**	**Persen**	**100**	**Persen**	**12.5**	**12.5**
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dokumen	1	Dokumen	0	0

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						an Penanggulangan Bencana di Daerah														
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dokumen	0	Dokumen	0	0
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dokumen	0	Dokumen	0	0
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Laporan	0	Laporan	0	0
1	05	03	2.04	0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Orang	0	Orang	0	0

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Bencana Kabupaten/Kota	yang memiliki kompetensi														
1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Orang	0	Orang	0	0

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kegiatan	5	Kegiatan	1	20

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	03	2.04	0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi lembaga swadaya masyarakat organisasi kemasyarakatan organisasi sosial organisasi keagamaan organisasi relawan perguruan tinggi media	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Lembaga	0	Lembaga	0	0

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal														
1	05	03	2.04	0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Laporan	0	Laporan	0	0

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dokumen	0	Dokumen	0	0
1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dokumen	2	Dokumen	0	0

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2025		
											Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	03	2.04	0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dokumen	0	Dokumen	0	0

Berdasarkan hasil evaluasi secara umum permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat kewilayahan, daerah perbatasan, kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat;
c. Belum optimalnya penyusunan dokumen peta rawan bencana di wilayah Kabupaten Bandung;
d. Kurang terpenuhinya data dukung berkenaan dengan data potensi bencana perwilayah, rekapitulasi kejadian bencana yang disertai kerugian material dan non material;
e. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga harus ada pergeseran di perubahan anggaran hal ini dikarenakan adanya refocusing Crosscutting;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.2 Analisis kinerja Pelayanan BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dipimpin oleh seorang Ex Officio adalah Sekretaris Daerah yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggara tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.2.1
T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Bandung

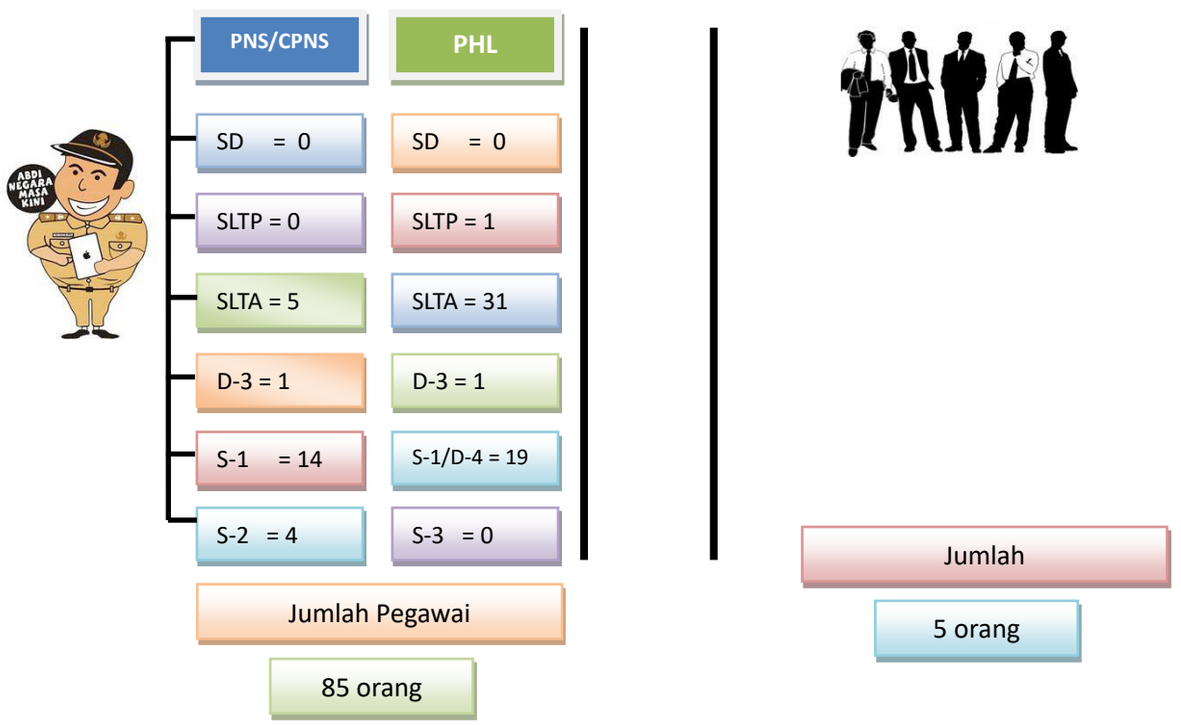
NO	INDIKATOR	SPM	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -			REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-		Proyeksi		Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)		0.58	0.59	0.7	0.56	0.68	0.69	0.7	
	Persentase peningkatan pelayanan kepada warga masyarakat yang terkena dampak bencana	1. Pelayanan informasi rawan bencana 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Nilai IKM		78	79	80	83,43	89,87	0	0	
	Nilai SAKIP		74	75	76	77,60	80,30	80.4	80.5	
	Persentase BMD		90%	95%	100 %	48,64	94,93	80%	80%	

NO	INDIKATOR	SPM	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -			REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-		Proyeksi		Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Kondisi Baik									

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Tugas, Pokok dan Fungsi BPBD

Sejak dibentuk pada tahun 2010 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.

Gambar 2.3.1
PROFIL
DEMOGRAFI PEGAWAI
BPBD TAHUN 2024



Dilihat dari ***Gambar 2.3.1*** Profil Demografi Pegawai diatas berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas, Pegawai BPBD Kabupaten Bandung sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya di dalam menentukan tugas-tugas kebencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan tingkat pendidikan sebagaimana di atas.

Pegawai BPBD Kabupaten Bandung berdasarkan golongan terdiri atas, Golongan II sebanyak 22 %, Golongan III sebanyak 52% dan Golongan IV sebanyak 26%, melihat komposisi tersebut, pegawai BPBD banyak ditempati oleh golongan II Dan III, dilain sisi BPBD memerlukan tambahan pegawai Golongan II dan III untuk tenaga administrasi dan tenaga konseptor dalam hal ini Jabatan Fungsional Umum (JFU) ataupun Jabatan Fungsional Teknis (JFT) dari PNS atau PPPK.

Di samping pendidikan formal, pegawai BPBD juga telah mengikuti pendidikan dan latihan struktural, data selengkapnya sebagai berikut:

a. Kepala Pelaksana
b. Sekretariat, membawahkan
   a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub. Analis Kebijakan Keuangan Pusat dan Daerah
   c. Sub. Perencana Ahli Muda
c. Bidang Kedaruratan dan Logistik
   Penata Penanggulangan Bencana
d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
   Penata Penanggulangan Bencana
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
   Penata Penanggulangan Bencana

Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung adalah:

TABEL 2.3.1
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD

Aspek Kajian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan BPBD
			Internal (kewenangan BPBD)	Eksternal (diluar kewenangan BPBD)	
1. Sumber Daya Manusia	Implementasi rencana kerja BPBD belum optimal	Rasio Jumlah Personil dengan Pelayanan Publik di Bidang Kebencanaan	Masih dalam proses adaptasi dengan tupoksi baru	Kuota perekrutan Aparatur terbatas	kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dibidang Penanggulangan Bencana

Aspek Kajian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan BPBD
			Internal (kewenangan BPBD)	Eksternal (diluar kewenangan BPBD)	
2. Sumber Daya Anggaran	Baru terpenuhinya kebutuhan Pendanaan/ Anggaran Sektoral BPBD	Perda. APBD tentang Rasio Pagu Anggaran Kebencanaan sebesar 30 % dari Total APBD	Rancangan Kebutuhan Pagu Anggaran yang proporsional	Regulasi/Kebijakan Pagu Anggaran APBD	Belum optimalnya Pagu Anggaran Sektoral BPBD
3. Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas kurang memadai	Permendagri No 7 Tahun (standarisasi sarana prasarana pemerintah)	Belum lengkapnya Rescue KIT	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
4. Pengurangan resiko bencana (mitigasi)	Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD), Penguranga n Resiko Bencana (PRB) dan Rencana Kontijensi	Dokumen Perencanaan Untuk jangka waktu tertentu	Pembuatan RAD, PRB dan Rencana Kontijensi masih dalam proses	Perda/Perbup tentang RAD, PRB dan Rencana Kontijensi belum terbit	Belum optimalnya kualitas Sistem Manajemen PRB yg didukung oleh RAD, PRB dan Rencana Kontijensi
5. Pemetaan daerah rawan bencana	Peta daerah rawan bencana belum tersosialisasikan ke seluruh swilayah kecamatan	Dana/Anggaran	Keterbatasan anggaran sosialisasi wilayah rawan bencana	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum optimalnya pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah dan jenis bencana

Aspek Kajian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan BPBD
			Internal (kewenangan BPBD)	Eksternal (diluar kewenangan BPBD)	
6. Pengembangan partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanggulangan Bencana	Belum optimalnya pembentukan Unit Cegah Siaga, Tim Reaksi Cepat dan Forum yang menampung aspirasi masyarakat dalam PB	Pencegahan/ Siaga dan Adaptasi	Terbatasnya ketersediaan Anggaran dan Rendahnya Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam PB	Belum terbitnya Perda Penanggulangan Bencana	Belum optimalnya peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha yang dikoordinir oleh BPBD dalam Penanggulangan Bencana
7. Peningkatan/Pengoptimalan Koordinasi lintas SKPD terkait Penanggulangan Bencana dari Aspek Kewenangan/Tupoksi, Penganggaran, Program dan Kegiatan	Belum Optimatnya Pelaksanaan kualitas Koordinasi Lintas SKPD terkait Penanggulangan Kebencanaan.	Kegiatan Sosialisasi dan Rapat Kerja	Fungsi Komando /memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana	Persepsi dan Intepretasi SKPD terhadap Penanggualangan Bencana belum sama dan sejalan.	Belum Optimalnya Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana baik lintas lembaga/intansi/SKPD, lintas program/kegiatan maupun Anggaran
8. Penanganan Siklus Manajemen Penanggulangan Bencana	Belum Optimalnya Pelayanan Penanggulangan Bencana pada saat Pra, Saat dan Pasca Bencana.	SPM (Standar Pelayanan Minimal) Penanggulangan Kebencanaan	SPM/SOP dalam Proses	Regulasi/Kebijakan SPM/SOP dari Pemerintah Pusat belum terbit	Belum adanya Pedoman/Acuan yang dilandasi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
9. Kajian Resiko Becana (KRB)	Belum Optimalnya Kegiatan KRB	Dokumen Kajian	Kewenangan dan Tupoksi	Anggaran dan SDM	Belum adanya Kajian yang Komprehensif terhadap gambaran secara menyeluruhterhadap resiko bencana suatu daerah

Aspek Kajian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan BPBD
			Internal (kewenangan BPBD)	Eksternal (diluar kewenangan BPBD)	
					dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah/Kabupaten Bandung dalam bentuk tertulis dan Peta
10. Sistem Penanganan Darurat Bencana	Terbentuknya Pusdalops dan Gis	SDM dan IPTEK	Tupoksi dan SDM	Peningkatan Anggaran untuk pengembngan SDM berupa Diklat/Bintek	Belum Optimalnya Sistem Manajemen Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Pemasalahan dalam penanggulangan bencana berdampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung terutama misi ketiga. Perubahan paradigma penanggulangan bencana yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (siaga bencana) berdampak langsung terhadap pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan. Siaga bencana merupakan tujuan dari peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tindakan untuk selalu menjaga lingkungan terutama di daerah rawan bencana. Pembangunan infrastruktur tidak bisa dilaksanakan oleh BPBD tetapi merupakan kegiatan multisektor sehingga perlu dibangun sebuah komitmen bersama penanggulangan bencana antar PD dengan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Bandung.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana kemudian terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing dalam penanggulangan bencana memberikan tantangan dan

peluang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tantangan dan peluang tersebut yaitu:

1) Penanggulangan bencana yang sudah terstruktur dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah memudahkan komando dan koordinasi antar dan lintas instansi pemerintah sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan pelayanan kebencanaan.

2) Perubahan paradigma penanggulangan bencana berdampak luas terhadap peraturan perundang-undangan terkait penanggaran dan pengelolaan keuangan daerah, karena pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan anggaran kebencanaan yang harus selalu siap digunakan ketika terjadi darurat bencana.

3) Keterlibatan pihak swasta baik lokal maupun asing dalam penanggulangan bencana menuntut pemerintah daerah untuk selalu mengawasi dan mengendalikan proses bantuan baik dalam penerimaan maupun penyalurannya.

Rekomendasi Strategis Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung:

1) Perlu adanya kejelasan payung hukum dari pemerintah pusat yang mengatur tentang alokasi dana kontinjensi dan dana siap pakai dalam APBD karena keberadaannya telah diamanatkan dalam PP Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

2) Perlunya penguatan kerjasama antar pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

3) Perlu adanya sinkronisasi dalam membuat peraturan perundangan-undangan yang harus dilaksanakan di daerah dengan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, sehingga peraturan tersebut dapat dilaksanakan atau diimplementasikan kepada masyarakat.

4) Kelembagaan penanggulangan bencana harus dapat bertindak lintas sektor dan lintas wilayah serta memiliki rantai komando yang jelas dan efektif.

2.4 Review Terhadap rancangan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada RPJMP dan RPJMD Kabupaten Bandung. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka penjang tersebut, penanggulangan bencana belum menjadi kebijakan utuh pemerintah Kabupaten Bandung karena masih menjadi bagian dalam kebijakan pengelolaan lingkungan. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen pemerintah Kabupaten Bandung terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Bandung untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung, BPBD yang baru terbentuk lima tahun membutuhkan anggaran untuk perbaikan dan pembenahan secara internal maupun ekternal. Secara internal, masih banyak kebutuhan peralatan kebencanaan terutama alat-alat evakuasi yang memiliki kualitas bagus dan sebuah manajemen gudang logistik yang representatif untuk menyimpan dan mengelola peralatan tersebut. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur BPBD yang siap siaga bencana melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh BPBD sendiri maupun oleh instansi kebencanaan lain yang kompeten. Secara ekternal, penguatan kelembagaan BPBD harus menjadi prioritas untuk menunjang tiga fungsi BPBD yaitu fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana. Penguatan kelembagaan BPBD harus melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat penanggulangan bencana seperti Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPERIDA), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Badan Keuangan Daerah (BKD) , Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) , Dinas Sosial (DINSOS), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kesehatan (DINKES), Dinas Pendidikan (DISDIK), Dinas Kebakaran (DISKAR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), SATPOL PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL), Dinas Pertanian (DISTAN), Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (BADAN KESBANGPOL) seluruh kecamatan dan kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung.

Pada Tahun Perencanaan 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung merumuskan Program dan Kegiatan sebagaimana dapat dilihat dari tabel **T-C.31** berikut.

Tabel 2.4.1

TABEL T-C.31

Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Bandung

Nama PD : BPBD

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kabupaten Bandung**	**Nilai IKM Nilai SAKIP**	**78 74**	**Rp 10,037,103,000.00**	**X**	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kabupaten Bandung**	**Nilai IKM Nilai SAKIP**	**78 74**	**Rp 10,798,918,413.00**
X	**XX**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase pemenuhan proses perencanaan**	**100 Persen**	**Rp 70,000,000.00**	**X**	**XX**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase pemenuhan proses perencanaan**	**100 Persen**	**Rp 70,000,000.00**
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Rp 20,000,000.00	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 20,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
X	XX	01	2.02	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp 20,000,000.00	X	XX	01	2.02	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp 20,000,000.00
X	XX	01	2.03	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp 5,000,000.00	X	XX	01	2.03	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp 5,000,000.00
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Rp 25,000,000.00	X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Rp 25,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
X	**XX**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan**	**100 Persen**	**Rp 9,293,357,661.00**	**X**	**XX**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan**	**100 Persen**	**Rp 7,149,673,551.00**
X	XX	01	2.02	01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/ Bulan	Rp 9,273,357,661.00	X	XX	01	2.02	01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/ Bulan	Rp 7,129,673,551.00
X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	Rp 20,000,000.00	X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	Rp 20,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
X	**XX**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah yang tepat waktu**	**100 Persen**	**Rp 5,000,000.00**	**X**	**XX**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah yang tepat waktu**		**Rp 5,000,000.00**
X	XX	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5 Laporan	Rp 5,000,000.00	X	XX	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5 Laporan	Rp 5,000,000.00
X	**XX**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase Administrasi Kepegawaian**	**100 Persen**	**Rp 49,800,000.00**	**X**	**XX**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase Administrasi Kepegawaian**	**100 Persen**	**Rp 49,800,000.00**
X	XX	01	2.05	07	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	Rp 49,800,000.00	X	XX	01	2.05	07	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	Rp 48,800,000.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
X	**XX**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai**	**100 Persen**	**Rp 672,873,862.00**	**X**	**XX**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai**	**100 Persen**	**Rp 630,408,862.00**
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Rp 19,800,000.00	X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Rp 19,800,000.00
X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Rp 248,805,362.00	X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Unit	Rp 248,805,362.00
X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Rp 0.00	X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Rp 0.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 45,000,000.00	X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 45,000,000.00
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Rp 20,160,000.00	X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Rp 20,160,000.00
X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Rp 5,000,000.00	X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Rp 5,000,000.00
X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Rp 0.00	X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Rp 0.00
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Rp 344,108,500.00	X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Rp 294,943,500.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
X	**XX**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**Rp 29,668,800.00**	**X**	**XX**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**Rp 29,668,800.00**
X	XX	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Rp 0.00	X	XX	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Rp 0.00
X	XX	02	2.08	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Rp 0.00	X	XX	02	2.08	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Rp 0.00
X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Rp 29,668,800.00	X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Rp 29,668,800.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)	Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
X	XX	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp 0.00	X	XX	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp 0.00
X	**XX**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**100 Persen**	**Rp 2,629,999,600.00**	**X**	**XX**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**100 Persen**	**Rp 2,822,285,030.00**
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 10,000,000.00	X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 10,000,000.00
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 112,500,000.00	X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 78,885,430.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)	Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 2,507,499,600.00	X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 2,733,399,600.00
X	**XX**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase Kpemenuhan Barang Milik Daerah Layak Pakai**	**100 Persen**	**Rp 949,844,000.00**	**X**	**XX**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase Kpemenuhan Barang Milik Daerah Layak Pakai**	**100 Persen**	**Rp 231,903,570.00**
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 0.00	X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Rp 0.00
X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	37 Unit	Rp 275,694,000.00	X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	37 Unit	Rp 168,321,970.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
							Perizinannya										Perizinannya		
X	XX	00	2.08	05	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Bandung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Rp 0.00	X	XX	00	2.08	05	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Bandung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Rp 0.00
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Rp 49,590,000.00	X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Rp 63,581,600.00
X	XX	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Rp 0.00	X	XX	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Rp 0.00
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	Rp.624,560,000.00	X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	Rp 0.00
					Jumlah Program 1				**Rp 13,700,543,923.00**						**Jumlah Program 1**				**Rp 10,998,739,813.00**
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Kabupaten Bandung**	**Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana**	**100 %**	**Rp 7,959,915,923.00**	**1**	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Kabupaten Bandung**	**Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana**	**100 %**	**Rp 4,210,615,643.00**

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota**	**Kabupaten Bandung**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**500000 Orang**	**Rp 549,665,600.00**	**1**	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota**	**Kabupaten Bandung**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**500000 Orang**	**Rp 904,816,232.00**
1	05	03	2.01	03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Rp 10,000,000.00	1	05	03	2.01	03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	0 Dokumen	Rp 0.00
1	05	03	2.01	04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman	500000 Orang	Rp 539,665,600.00	1	05	03	2.01	04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman	500000 Orang	Rp 904,816,232.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
							yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya										yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**250000 Orang**	**Rp 4,785,249,465.00**	**1**	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**250000 Orang**	**Rp 2,142,702,768.00**
1	05	03	2.02	14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	0 Dokumen	Rp 8,600,000.00	1	05	03	2.02	14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	0 Dokumen	Rp 8,600,000.00
1	05	03	2.02	12	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	3 Kawasan	Rp 300,000,000.00	1	05	03	2.02	12	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0 Kawasan	Rp 0.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
1	05	03	2.02	17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	Rp 2,190,189,650.00	1	05	03	2.02	17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	1 Laporan	Rp 1,152,438,168.00
1	05	03	2.02	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	3 Unit	Rp 269,760,950.00	1	05	03	2.02	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	0 Unit	Rp 0.00
1	05	03	2.02	13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	0 Dokumen	Rp 7,600,000.00	1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	0 Dokumen	Rp 0.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kabupaten Bandung	- Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalamPencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana - Jumlah Kegiatan Stabilisasi Lereng/penahan tanah	- 4 Kawasan	Rp 919,865,865.00	1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kabupaten Bandung	- Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalamPencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana - Jumlah Kegiatan Stabilisasi Lereng/penahan tanah	- 4 Kawasan	Rp 595,799,000.00
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	150 Orang	Rp 444,400,000.00	1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	0 Orang	Rp 0.00
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2 Dokumen	Rp 194,378,000.00	1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2 Dokumen	Rp 145,174,000.00
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	200 Orang	Rp 245,754,000.00	1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	200 Orang	Rp 85,194,600.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
1	05	03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	0 Dokumen	Rp 204,701,000.00	1	05	03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Rp 155,497,000.00
1	05	03	2.02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	Rp 0.00	1	05	03	2.02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	Rp 0.00
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**170000 Orang**	**Rp 1,625,122,450.00**	**1**	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**170000 Orang**	**Rp 824,560,000.00**
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	Rp 5,243,000.00	1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0 Laporan	Rp 0.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	- 1 Dokumen - 100%	Rp 350,000,000.00	1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	- 1 Dokumen - 100%	Rp 319,565,600.00
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100000 Orang	Rp 182,360,000.00	1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100000 Orang	Rp 83,440,000.00
1	05	03	2.03	09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	70000 Orang	Rp 1,069,959,450.00	1	05	03	2.03	09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	70000 Orang	Rp 417,654,400.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
1	05	03	2.03	11	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	0 Laporan	Rp 7,560,000.00	1	05	03	2.03	11	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	0 Laporan	Rp 3,300,000.00
1	05	03	2.03	10	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kabupaten Bandung	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	- 1 Dokumen - 100%	Rp 10,000,000.00	1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kabupaten Bandung	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	- 0 Dokumen - 0%	Rp 600,000.00
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**persentase lembaga kebencanaan/PD yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan**	**100 %**	**Rp 999,878,408.00**	**1**	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**persentase lembaga kebencanaan/PD yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan**	**100 %**	**Rp 338,536,643.00**

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0 Dokumen	Rp 0.00	1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0 Dokumen	Rp 0.00
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	0 Dokumen	Rp 0.00	1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	0 Dokumen	Rp 0.00
1	05	03	2.04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0 Dokumen	Rp 0.00	1	05	03	2.04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0 Dokumen	Rp 0.00
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	0 Dokumen	Rp 130,695,000.00	1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	0 Dokumen	Rp 0.00
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelengga	0 Laporan	Rp 0.00	1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelengga	0 Laporan	Rp 0.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
					Penanggulangan Bencana		raan Penanggulangan Bencana								Penanggulangan Bencana		raan Penanggulangan Bencana		
1	05	03	2.04	07	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	0 Orang	Rp 0.00	1	05	03	2.04	07	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	0 Orang	Rp 0.00
1	05	03	2.04	08	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	100 Orang	Rp 107,663,200.00	1	05	03	2.04	08	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	0 Orang	Rp 0.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
1	5	3	2.04	09	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	5 Kegiatan	Rp 107,663,200.00	1	5	3	2.04	09	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	0 Kegiatan	Rp 0.00
1	5	3	2.04	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	5 Kegiatan	Rp 107,663,200.00	1	5	3	2.04	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	5 Kegiatan	Rp 130,856,643.00
1	5	3	2.04	11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan	Kabupaten Bandung	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam	0 Lembaga	Rp 0.00	1	5	3	2.04	11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan	Kabupaten Bandung	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam	0 Lembaga	Rp 0.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
					Pascabencana Kabupaten/ Kota		penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal									Pascabencana Kabupaten/ Kota		penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal		
1	5	3	2.04	12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan	Rp 128,161,708.00	1	5	3	2.04	12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan	Rp 6,830,000.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
1	5	3	2.04	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	Rp 338,166,500.00	1	5	3	2.04	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	Rp 200,000,000.00
					Jumlah Program 2				**Rp 7,959,915,923.00**						**Jumlah Program 2**				**Rp 4,210,615,643.00**
					Jumlah Program 1+2				**Rp 21,660,459,846.00**						**Jumlah Program 1+2**				**Rp 15,199,355,456.00**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung berasaskan lima prinsip yaitu perencanaan **politik**, perencanaan **teknokratik**, perencanaan **partisipatif**, perencanaan ***top down***, dan perencanaan ***bottom up***. Musrenbang Kabupaten Bandung tahun 2024 merupakan bagian dari perencanaan partisipatif, perencanaan ***top down*** dan perencanaan ***bottomup*** yang dimulai dari tingkat desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten. Namun demikian sejak tahun anggaran 2017 pada kegiatan musrenbang kewilayahan (usulan ***bottom up***), BPBD Kabupaten Bandung tidak termasuk OPD yang mengusung dan mengakomodir usulan musrenbang kewilayahan.

2.6 Capaian SPM tahun 2024

Selain melaksanakan evaluasi dan analisis capaian kinerja berdasarkan kinerja per sasaran, evaluasi juga dilakukan terhadap capaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat urusan bencana.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian pelayanan SPM tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung beserta target kinerja, anggaran dan capaian realisasinya, dapat Kami sampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.6.1

Laporan Evaluasi Kinerja Penerapan SPM Tahun 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja %
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana**	**Persen**	**100**	**100**	**100**
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**Orang**	**500**	**500**	**100**
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja %
Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	500.000	500.000	100
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Orang**	**250.000**	**250.000**	**100**
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	100
Pelatihan Pencegahan an Mitigasi Bencana abupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Dan Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Dan Kesiapsiagan	Orang	0	0	0
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	100
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	100
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	200	200	100
Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	3	3	100

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja %
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara Keluarga maupun Petugas	Unit	0	0	0
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	0	0	0
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Orang**	**170.000**	**170.000**	**100**
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	0	0	0
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	11	11	100
Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	46.000	46.000	100
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	28.000	28.000	100
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	Laporan	1	1	100

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja %
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	0	0	0
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Persentase lembaga kebencanaan/PD yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan**	**Persen**	**100**	**100**	**100**
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	0	0	0
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan	10	10	100
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Laporan	0	0	0
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	2	2	100
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi	Dokumen	0	0	0

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja %
	dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				

2.7 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) BPBD Tahun 2024

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan suatu rencana aksi global yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. SDGs/TPB terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global di tahun 2030.

Pada tahun 2020, pemerintah pusat melalui Bappenas menerbitkan pedoman Penyusunan Teknis Penyusunan Rencana Aksi SDGs/TPB yang merespons perubahan yang terjadi dalam RPJMN 2020-2024 dan tantangan pandemi COVID-19. Pedoman ini juga dilengkapi dengan 4 (empat) buku metadata indikator SDGs/TPB Indonesia edisi II yang terdiri atas metadata pilar pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Metadata ini juga menjadi acuan untuk mengukur pencapaian TPB/SDGs Indonesia agar dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia serta keterbandingan antarprovinsi dan antarkabupaten/kota di Indonesia.

1. Kerangka Evaluasi Capaian SDGs BPBD Kabupaten Bandung

Dalam melakukan evaluasi capaian SDGs Kabupaten Bandung, BPBD Kabupaten Bandung tidak melakukan evaluasi terhadap seluruh sasaran/indikator, melainkan merumuskan indikator prioritas yang disesuaikan dengan wewenang dan kapasitas Pemerintah Kabupaten Bandung. Indikator prioritas yang disesuaikan pada Penanggulangan Bencana terdapat pada **Pilar Lingkungan dan Pilar Tanpa Kemiskinan**.

2. Hasil Evaluasi Capaian SDGs BPBD Kabupaten Bandung

Penjelasan mengenai hasil evaluasi capaian SDGs BPBD Kabupaten Bandung diuraikan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu tinjauan umum capaian SDGs BPBD Kabupaten Bandung, serta capaian SDGs BPBD Kabupaten Bandung berdasarkan Pilar Lingkungan.

3. Tinjauan Umum Capaian SDGs BPBD Kabupaten Bandung

Penilaian dilakukan dengan membandingkan capaian Kabupaten Bandung dengan target nasional dan targer provinsi Jawa Barat.

Evaluasi pada tahun 2020 memiliki kondisi yang sedikit berbeda dengan sebelumnya, karena adanya pandemi COVID-19, yang berdampak terutama pada kinerja di sektor sosial dan ekonomi. Akibatnya beberapa indikator yang pada tahun 2019 telah tercapai, memiliki capaian yang berada di bawah target pada tahun 2020. Dengan demikian, penting untuk memerhatikan upaya penanggulangan COVID-19 untuk memenuhi target capaian di masa depan.

Dari total indikator yang telah dan diprediksi akan tercapai, untuk indikator yang berkaitan dengan pembangunan lingkungan, sebagian besar masih memerlukan pendataan lebih lanjut.

4. Capaian SDGs BPBD Kabupaten Bandung

Dari tujuan yang menjadi bagian dari pilar lingkungan, hasil capaian tahun 2024 ialah Untuk pencapaian tujuan kota dan permukiman dan layak, indikator yang berkaitan masih perlu pendataan mendalam yang membagi korban bencana menjadi korban jiwa, korban hilang, korban terluka dan korban mengungsi. Adapun untuk BPBD berada di pilar sosial TPB/SDGs Tanpa Kemiskinan (**Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun**) dan pilar Lingkungan TPB/SDGs Tanpa Kemiskinan Kota Berkelanjutan (**Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif. Aman. Tangguh dan Berkelanjutan**).

Capaian, Target Realisasi beserta anggaran dapat disampaikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7.1

Capaian dan Target SDG's TPB 1 : Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun)

Tahun 2024

No	Indikator Metadata 1		Indikator Proxy	Satuan Data Target	Data 2021	2024		
					(Baseline)	Target	Capaian	Status
5	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	_	Desa		0		
	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	_					
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	_	Dokumen	1	3	3	Tercapai

Tabel 2.7.2

Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

SDG's TPB 1 : Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun)

No	Indikator Metadata 1		Program (RKPD 2024)	Kegiatan (RKPD 2024)	Sub Kegiatan (RKPD 2024)	Anggaran (RKPD 2024)	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
5	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	**595,799,000**	APBD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH/DINAS PENDIDIKAN
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	**0**	**APBD**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Kontijensi	145.174.000		
					Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	8.600.000		

Tabel 2.7.3

Capaian dan Target SDG's
TPB 11 : Kota Dan Komunitas Berkelanjutan ("Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif. Aman.
Tangguh dan Berkelanjutan) Tahun 2025

No	Indikator Metadata 1		Indikator Proxy	Satuan Data Target	Data 2021	2024		
					(Baseline)	Target	Capaian	Status
5	11.5.1*	Jumlah korban meninggal. hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		Orang /	Korban Meninggal	Korban Meninggal	Korban Meninggal	
				100	-1	0	-19	
					Korban Hilang	Korban Hilang	Korban Hilang	
					0	0	0	
					Korban Terluka	Korban Terluka	Korban Terluka	
					0	0	-165	
					Korban Mengungsi	Korban Mengungsi	Korban Mengungsi	
					-657	0	-12,103	
	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).					117,13	
	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.						
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		Unit		6	6	Tercapai

Tabel 2.7.4

Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
SDG's TPB 11 : Kota Dan Komunitas Berkelanjutan ("Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif.
Aman. Tangguh dan Berkelanjutan)

No	Indikator Metadata 1		Indikator Proxy	Satuan Data Target	Program (RKPD 2024)	Kegiatan (RKPD 2024)	Sub Kegiatan (RKPD 2024)	Anggaran (RKPD 2024)	Sumber Pembiayaan
5	11.5.1*	Jumlah korban meninggal		Orang/	Program Penanggula	Pelayanan Penyelamatan dan	Respon Cepat Kejadian	**0**	

No	Indikator Metadata 1		Indikator Proxy	Satuan Data Target	Program (RKPD 2024)	Kegiatan (RKPD 2024)	Sub Kegiatan (RKPD 2024)	Anggaran (RKPD 2024)	Sumber Pembiayaan
		. hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		100.000	ngan Bencana	Evakuasi Korban Bencana	Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		
							Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	**319,565,600**	
							Pencarian. Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	**83,440,000**	
							Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	**417,654,400**	APBD
							Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	**3,300,000**	
							Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	**600,000**	
	11.5.1. (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).			Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	**0.00**	APBD
	11.5.1. (b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.			Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	**0**	APBD
	11.5.1. (c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		Unit	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**1,152,438,168**	APBD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas nasional pada dokumen RPJMN salah satunya Prioritas Ke-6 yaitu tentang "**Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**" diintegrasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 memuat 9 prioritas dimana prioritas nomor lima berbunyi "**Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Mendukung PembangunanBerkelanjutan dan Mengantisipasi Risiko Perubahan Iklim**", ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Prioritas ke-6 yaitu "**Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana**". Sedangkan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung masuk dalam misi keempat yaitu "Meningkatnya kualitas insfrastruktur yang integrasi dan berwawasan lingkungan". Untuk mendukung pencapaian misi keempat Kabupaten Bandung serta tujuan dan sasaran BPBD, disusunlah empat strategi penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung yaitu:

1. Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur BPBD;
2. Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam kondisi siaga bencana dan tanggap darurat;
3. Memberdayakan seluruh sumber daya kebencanaan di Kabupaten Bandung dalam rangka mewujudkan *good governance*;
4. Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Tahun 2026

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal

yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.



BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung. Untuk itu, disusun visi dan misi BPBD yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029 mengacu kepada Visi-Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, yaitu :

"Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih BEDAS, Maju dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas."

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung adalah melaksanakan misi ke-4 (Keempat) yaitu:

"4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan".

Untuk mendukung misi ini, aspek kebencanaan merupakan salah satu komponen yang perlu diakomodir dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut didasari oleh kondisi Kabupaten Bandung yang memiliki beberapa potensi bencana. Meninjau historis kebelakang, beberapa bencana cenderung tidak dapat dihindarkan dan mengganggu stabilitas pembangunan. Mitigasi berupa pencegahan terjadinya bencana tidak akan menghilangkan seluruh resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya terkait penanganan aspek kebencanaan selain mengakomodir upaya mitigasi perlu pula untuk diarahkan pada upaya adaptasi berupa rekayasa infrastruktur dan fasilitas public agar memiliki kepentingan terhadap bencana.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran, kewenangan, tugas pokok dan fungsi (***Core business***) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman kepada RPJM Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2026 dalam rangka mendukung misi yang tertuang dalam RPJMD (Misi Keempat), dalam program dan kegiatan di tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Terwujudnya Wilayah Kabupaten Bandung yang Tangguh Terhadap Bencana Melalui Peningkatan Kapasitas Masyarakat yang Berkelanjutan dan Kolaborasi Multipihak Secara Terpadu Untuk Penanggulangan Bencana

SASARAN

1. Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penangulangan Bencana;
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat
5. Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana

Tujuan BPBD Kabupaten Bandung merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam

merealisasikan misi dari BPBD kabupaten Bandung. Untuk mewujudkan misi Bupati Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional. Berikut turunan Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijelaskan melalui indikator (output) pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.1
Tabel Tujuan dan Sasaran BPBD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana - Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyusunan Kajian Risiko Bencana - Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Indeks Ketahanan Daerah; 2. KIE rawan bencana - Pedoman Nomor 3 Tahun 2024 - Perka BNPB Nomor 7 Tahun 2015; 3. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana - Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana; 4. Penyusunan Rencana Kontijensi; 5. Pelatihan pencegahan dan mitigasi; 6. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana; 7. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana	Terwujudnya Wilayah Kabupaten Bandung yang Tangguh Terhadap Bencana Melalui Peningkatan Kapasitas Masyarakat yang Berkelanjutan dan kolaborasi multipihak secara terpadu untuk penanggulangan bencana				Indeks Risiko Bencana		
		Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			Indeks Ketahanan Daerah		Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana. Penilaian ini mencakup 7 Prioritas, 71 Indikator dan 284 komponen yang mana dari tiap-tiap komponen tersebut senantiasa dapat diselengarakan oleh tiat-tiap perangkat daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
prasarana kesiapsiagaan							yang menjadi tugas dan fungsinya
- Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023; 8. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 9. Respon cepat KLB penyakit/wabah zoonosis prioritas; 10. Respon cepat darurat bencana - Juklak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengkajian Cepat pada Keadaan Darurat Bencana; 11. Aktivasi SKPDB - Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang SKPDB - Juklak Nomor 10 Tahun 2023 tentang SKPDB; 12. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana - Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2010			1. Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 2. Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat; 3 Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana.		1. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana; 2. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana; 3. Persentase Penanganan Pasca Bencana.	**Program Penanggulangan Bencana**	
				Terselenggaranya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	
						Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	
						Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
						Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
						Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
						Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
						Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
						Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
						Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pelayananan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	
						Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
						Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
						Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
						Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	
						Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
				Terselenggaranya penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terintegrasi	1 Jumlah Dokumen Regulasi yang tersusun 2 Jumlah Sistem informasi yang aktif dan terintegrasi 3 Jumlah Peserta Pelatihan SDM kebencanaan	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	
						Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
						Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
						Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
						Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
						Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
						Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	
						Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	
						Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
						Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlaksananya Administrasi BMD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
						Pemeliharaan Mebel	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

3.3 Program dan Kegiatan

Pada dasarnya kegiatan BPBD Kabupaten Bandung adalah sebagai OPD pendukung dalam Misi 4 **“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan”.** Seiring dengan berjalannya program dan kegiatan di Tahun Anggaran 2026 Untuk lebih mendorong pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung. Tahun Perencanaan 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung merumuskan **2 Program** dengan Pagu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** sebesar **Rp 13,046,774,200.00** dan **Program Penanggulangan Bencana** sebesar **Rp 5,015,741,000.00** serta melaksanakan **12 Kegiatan** dan **48 Sub Kegiatan.**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Indikasi rencana program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan PD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah, maka BPBD perlu melakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif, yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan PD BPBD dalam penyusunan rencana kerja

Prioritas pembangunan BPBD Kabupaten Bandung diarahkan pada beberapa hal yang dianggap merupakan isu strategis daerah khususnya dibidang penaggulangan bencana sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam pengananganan segera. Hal tersebut antara lain:

1. Peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan;
2. Koordinasi dan kolaborasi antar lembaga;
3. Pemanfaatan teknologi dan inovasi;
4. Pelayanan yang berbasis kebutuhan khusus;
5. Pemulihan dan rehabilitasi yang berkelanjutan;
6. Pengurangan risiko bencana melalui perencanaan tata ruang;
7. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat;
8. Pengembangan sistem peringatan dini yang efektif;
9. Penanganan dampak psikologis dan trauma;
10. Evaluasi dan pembelajaran dari pengalaman bencana.

Prioritas Sebagaimana diatas dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

6. Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penangulangan Bencana;
7. Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
8. Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
9. Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat
10. Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana

Serta dalam rangka peningkatan Standar pelayanan minimal kepada masyarakat yang terdiri dari :

1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Dalam rangka menunjang program/kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung tersebut, maka BPBD Kabupaten Bandung dalam pelaksanaanya harus ditunjang oleh anggaran program operasional dengan melakukan pemetaan ke Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3604 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kodefikasi Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam **Sub Kegiatan** Sebagai berikut:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam **Sub Kegiatan** Sebagai berikut:

1) Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN;
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam **Sub Kegiatan** Sebagai berikut:

1) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam **Sub Kegiatan** Sebagai berikut:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam **Sub Kegiatan** Sebagai berikut:

1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
3) Penyediaan peralatan rumah tangga;
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;;
6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam **Sub Kegiatan** Sebagai berikut:

1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3) Pengadaan Mebel;
4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam **Sub Kegiatan** Sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pelayanan.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam **Sub Kegiatan** Sebagai berikut:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
4) Pemeliharaan Mebel;
5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
6) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

9. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam **Sub Kegiatan** Sebagai berikut:

1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).

10. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam **Sub Kegiatan** Sebagai berikut:

1) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
2) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
3) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam;
5) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
6) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
7) Penyusunan Rencana Kontijensi;
8) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
9) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;
10) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
11) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi BencanaKabupaten/Kota;

11. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam **Sub Kegiatan** Sebagai berikut:

1) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas;
2) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;
3) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
4) Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota;
5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

6) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
7) Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit;
8) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

12. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam **Sub Kegiatan** Sebagai berikut:

1) Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
2) Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota;
3) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
4) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;
5) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
7) Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota;
8) Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota;
9) Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota;
10) Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota;
11) Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota;
12) Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota.

Penjelasan rencana kerja dan pendanaan BPBD Tahun Anggaran 2024 disampaikan pada **Tabel 4.1**

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Tahun 2026
Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
A.	**Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat**	1	05	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah**	**BPBD Kabupaten Bandung**	**1. 76 Poin 2. 45 Poin**	**Rp 13,046,774,200.00**	APBD	
A.1		1	05	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**	**BPBD Kabupaten Bandung**	**80,50 Poin**	**Rp 80,000,000.00**	APBD	
A.1.1		1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD Kabupaten Bandung	6 Dokumen	Rp 10,000,000.00	APBD	
A.1.2		1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPBD Kabupaten Bandung	2 Dokumen	Rp 10,000,000.00	APBD	
A.1.3		1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BPBD Kabupaten Bandung	2 Dokumen	Rp 5,000,000.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
A.1.4		1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD Kabupaten Bandung	6 Laporan	Rp 55,000,000.00	APBD	
A.2		1	05	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1. Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu 2. Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan**	**BPBD Kabupaten Bandung**	**100%**	**Rp 9,446,537,000.00**	APBD	
A.2.1		1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Kabupaten Bandung	33 Orang/bulan	Rp 9,386,537,000.00	APBD	
A.2.2		1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPBD Kabupaten Bandung	3 Laporan	Rp 60,000,000.00	APBD	
A.3		1	05	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian**	**BPBD Kabupaten Bandung**	**-**	**Rp 5,484,000.00**	APBD	
A.3.1		1	05	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BPBD Kabupaten Bandung	5 Laporan	Rp 5,484,000.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
A.4		1	05	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu**	**BPBD Kabupaten Bandung**	**100 %**	**Rp 50,000,000.00**	APBD	
A.4.1		1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BPBD Kabupaten Bandung	100 Paket	Rp 50,000,000.00	APBD	
A.4.2		1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BPBD Kabupaten Bandung	0 Orang	Rp -	APBD	
A.4.3		1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPBD Kabupaten Bandung	0 Orang	Rp -	APBD	
A.5		1	05	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan operasional perkantoran Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai**	**BPBD Kabupaten Bandung**	**100%**	**Rp 420,957,200.00**	APBD	
A.5.1		1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	15 Paket	Rp 10,000,000.00	APBD	
A.5.2		1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	8 Paket	Rp 130,000,000.00	APBD	
A.5.3		1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	0 Paket	Rp -	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
A.5.4		1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	1 Paket	Rp 30,000,000.00	APBD	
A.5.5		1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	6 Paket	Rp 30,000,000.00	APBD	
A.5.6		1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	4 Dokumen	Rp 10,000,000.00	APBD	
A.5.7		1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPBD Kabupaten Bandung	0 Laporan	Rp -	APBD	
A.5.8		1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD Kabupaten Bandung	1 Laporan	Rp 210,957,200.00	APBD	
A.6		1	05	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**BPBD Kabupaten Bandung**	**100%**	**Rp -**	APBD	
A.6.1		1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp -	APBD	
A.6.2		1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp -	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
A.6.3		1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp -	APBD	
A.6.4		1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp -	APBD	
A.7		1	05	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**BPBD Kabupaten Bandung**	**100%**	**Rp 2,618,796,000.00**	APBD	
A.7.1		1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD Kabupaten Bandung	1 Laporan	Rp 5,000,000.00	APBD	
A.7.2		1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	12 Laporan	Rp 102,500,000.00	APBD	
A.7.3		1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	12 Laporan	Rp 2,511,296,000.00	APBD	
A.8		1	05	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Kpemenuhan Barang Milik Daerah Layak Pakai**	**BPBD Kabupaten Bandung**	**80%**	**Rp 425,000,000.00**	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
A.8.1		1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BPBD Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp -	APBD	
A.8.2		1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BPBD Kabupaten Bandung	37 Unit	Rp 150,000,000.00	APBD	
A.8.3		1	05	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	BPBD Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp -	APBD	
A.8.4		1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	BPBD Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp -	APBD	
A.8.5		1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BPBD Kabupaten Bandung	2 Unit	Rp 75,000,000.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
A.8.6		1	05	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	BPBD Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp -	APBD	
A.8.7		1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPBD Kabupaten Bandung	1 Unit	Rp 200,000,000.00	APBD	
		1	05	03			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Permendagri 18 tahun 2020) 2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Permendagri 18 tahun 2020) 3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pcnyelamatan dan evakuasi korban bencana (Permendagri 18 tahun 2020) 4. Persentase Pelaksanaan Koordinasi dalam Penanganan Pasca Bencana**	**BPBD Kabupaten Bandung**	**100 %**	**Rp 5,015,741,000.00**	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
B.		1	05	03	2.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal 2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana (Permendagri 18 Tahun 2020)**	**BPBD Kabupaten Bandung**	**140373 Orang**	**Rp 355,000,000.00**	APBD	
B.1	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	BPBD Kabupaten Bandung	140373 Orang	Rp 350,000,000.00	APBD	
B.1.1		1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	BPBD Kabupaten Bandung	-	Rp 5,000,000.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
B.1.2		1	05	03	2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/ legal 2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal 3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan 4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan 5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana 6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan (Permendagri 18 Tahun 2020)**	**BPBD Kabupaten Bandung**	**18679 Orang**	**Rp 2,092,241,000.00**	APBD	
B.2		1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	BPBD Kabupaten Bandung	1 Kegiatan	Rp 50,000,000.00	APBD	
B.2.1		1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara Keluarga maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	BPBD Kabupaten Bandung	9 Unit	Rp 300,000,000.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
B.2.2		1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	BPBD Kabupaten Bandung	200 Orang	Rp 250,000,000.00	APBD	
B.2.3		1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	BPBD Kabupaten Bandung	0 Keluarga	Rp -	APBD	
B.2.4		1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	BPBD Kabupaten Bandung	2 Kawasan	Rp 443,841,200.00	APBD	
B.2.5		1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	BPBD Kabupaten Bandung	80 Orang	Rp 141,000,000.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
B.2.6		1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	BPBD Kabupaten Bandung	2 Dokumen	Rp 210,000,000.00	APBD	
B.2.8		1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	BPBD Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp 4,000,000.00	APBD	
B.2.9		1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	BPBD Kabupaten Bandung	1 Laporan	Rp 436,000,000.00	APBD	
B.2.10		1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	BPBD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp 50,000,000.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
B.2.11		1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	BPBD Kabupaten Bandung	3 Kawasan	Rp 207,399,800.00	APBD	
B.2.12		1	05	03	2.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB 2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana 4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana (Permendagri 18 Tahun 2020)**	**BPBD Kabupaten Bandung**	**1820 Orang**	**Rp 1,508,500,000.00**	APBD	
B.3		1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	BPBD Kabupaten Bandung	1 Laporan	Rp 7,020,000.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
B.3.1		1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	BPBD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp 340,192,000.00	APBD	
B.3.2		1	05	03	2.03	0003	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	BPBD Kabupaten Bandung	1820 Orang	Rp 81,402,000.00	APBD	
B.3.3		1	05	03	2.03		Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	BPBD Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp -	APBD	
B.3.4		1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	BPBD Kabupaten Bandung	455 Orang	Rp 111,827,000.00	APBD	
B.3.5		1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD Kabupaten Bandung	1820 Orang	Rp 957,519,000.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
B.3.6		1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	BPBD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp 4,400,000.00	APBD	
B.3.7		1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	BPBD Kabupaten Bandung	1 Laporan	Rp 6,140,000.00	APBD	
B.3.8		1	05	03	2.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**1. Jumlah Dokumen Regulasi yang tersusun 2. Jumlah Sistem informasi yang aktif dan terintegrasi 3. Jumlah Peserta Pelatihan SDM kebencanaan**	**BPBD Kabupaten Bandung**	**100%**	**Rp 1,060,000,000.00**	APBD	
B.4		1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	BPBD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp 10,000,000.00	APBD	
B.4.1		1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	BPBD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp 20,000,000.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
B.4.2		1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	BPBD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp 100,000,000.00	APBD	
B.4.3		1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	BPBD Kabupaten Bandung	0 Laporan	Rp -	APBD	
B.4.4		1	05	03	2.04	0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	BPBD Kabupaten Bandung	0 Orang	Rp -	APBD	
B.4.5		1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	BPBD Kabupaten Bandung	24 Orang	Rp 195,000,000.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
B.4.6		1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	BPBD Kabupaten Bandung	5 Kegiatan	Rp 341,089,000.00	APBD	
B.4.7		1	05	03	2.04	0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi lembaga swadaya masyarakat organisasi kemasyarakatan organisasi sosial organisasi keagamaan organisasi relawan perguruan tinggi media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	BPBD Kabupaten Bandung	0 Lembaga	Rp -	APBD	
B.4.8		1	05	03	2.04	0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	BPBD Kabupaten Bandung	1 Laporan	Rp 140,000,000.00	APBD	
B.4.9		1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	BPBD Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp -	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
B.4.10		1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	BPBD Kabupaten Bandung	2 Dokumen	Rp 178,911,000.00	APBD	
B.4.11		1	05	03	2.04	0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	BPBD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp 75,000,000.00	APBD	
Jumlah Program 1+2											**Rp 18,062,515,200.00**		

4.1 Target Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Salah satu ketentuan perundang-undangan yang mengikat BPBD sebagai badan pemerintahan yang memberikan pelayanan berkaitan dengan pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam pelayanan dasar ini BPBD menjadi bagian dari sub urusan bencana.

Adapun untuk target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, dapat Kami sampaikan targetnya sebagai berikut :

Tabel 4.1.1

Target Kinerja Pelaksanaan SPM Tahun 2025-2030

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian (Jumlah Warga)	Indikator Pencapaian (Jumlah Warga)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	**Pelayanan informasi rawan bencana**	**Jumlah Warga Negara yang terdampak bencana**	**Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**140.373 Orang**	**140.373 Orang**	**140.373 Orang**	**140.373 Orang**	**140.373 Orang**
1.a.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1.b.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1.c.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana			140.373 Orang	140.373 Orang	140.373 Orang	140.373 Orang	140.373 Orang
1.d.	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana			6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit
2	**Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana**	**Jumlah Warga Negara terdampak bencana**	**Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaa**	**18.679 Orang**	**18.679 Orang**	**18.679 Orang**	**18.679 Orang**	**18.679 Orang**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian (Jumlah Warga)	Indikator Pencapaian (Jumlah Warga)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
			n terhadap bencana					
2.a.	Sarana prasarana penanggulangan bencana			17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit
2.b.	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)			3.736 Orang	3.736 Orang	3.736 Orang	3.736 Orang	3.736 Orang
3	**Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**Jumlah Warga Negara terdampak bencana**	**Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**5.598 Orang**	**5.598 Orang**	**5.598 Orang**	**5.598 Orang**	**5.598 Orang**
3.a.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana			1	1	1	1	1
3.b.	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana			5.598 Orang	5.598 Orang	5.598 Orang	5.598 Orang	5.598 Orang
3.c.	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana			100%	100%	100%	100%	100%
3.d.	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas			100%	100%	100%	100%	100%
3.e.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana			5.598 Orang	5.598 Orang	5.598 Orang	5.598 Orang	5.598 Orang

4.2 Target Kinerja pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)

Dalam Pelaksakan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Bandung pun turut serta dan memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten Bandung, adapun indikator SDGs yang dilaksakan oleh BPBD Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.1

Indikator SDGs Pada BPBD Kab. Bandung

NO.	Tujuan	Target	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana .	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jiwa	0	0	0	0	0	0	
			Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Kawasan/ Destana/ Kelana	2	2	2	2	2	2	
			Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial								
			Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Poin	116	115	114	113	112	111	
			Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Nilai	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
			Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
2	Menjadikan Kota dan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Poin	116	115	114	113	112	111	

NO.	Tujuan	Target	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Unit	2	2	2	2	2	2	
			Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Nilai	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
			Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
3	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	1	1	1	1	1	1	

Tabel 4.2.2

Target SDG's TPB 1 : Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun)

Tahun 2024

No	Indikator Metadata 1		Indikator Proxy	Satuan Data Target	Data 2024 (Baseline)	2025			2026			2027			2028			2029			2030		
						Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status
5	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	_	Desa		2			2			2			2			2			2		
	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	_																				
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	_	Dokumen	1	4			5			6			7			8			9		

Tabel 4.2.3

Target TPB 11 : Kota Dan Komunitas Berkelanjutan (Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif. Aman. Tangguh dan Berkelanjutan) Tahun 2025-2030

No	Indikator Metadata 1		Indikator Proxy	Satuan Data Target	2025			2026			2027			2028			2029			2030		
					Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status
5	11.5.1*	Jumlah korban meninggal. hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		Orang/ 100.000	Korban Meninggal (0.00) Korban Hilang (0.00) Korban Terluka (0.00) Korban Mengungsi (0.00)			Korban Meninggal (0.00) Korban Hilang (0.00) Korban Terluka (0.00) Korban Mengungsi (0.00)			Korban Meninggal (0.00) Korban Hilang (0.00) Korban Terluka (0.00) Korban Mengungsi (0.00)			Korban Meninggal (0.00) Korban Hilang (0.00) Korban Terluka (0.00) Korban Mengungsi (0.00)			Korban Meninggal (0.00) Korban Hilang (0.00) Korban Terluka (0.00) Korban Mengungsi (0.00)			Korban Meninggal (0.00) Korban Hilang (0.00) Korban Terluka (0.00) Korban Mengungsi (0.00)		
	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).																				
	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.																				
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		Unit																		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Bandung merupakan rencana kerja tahunan dalam bentuk program dan kegiatan dalam aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana guna mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan tepat guna. Dengan pemetaan ke Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi diharapkan akan terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan dengan skema OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung maupun OPD yang membidangi urusan lain.

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (***stakeholders***) dalam menciptakan ***Good Governance*** sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana.

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Bandung selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPBD Kabupaten Bandung. RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BPBD Kabupaten Bandung.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi BPBD Kabupaten Bandung selama kurun waktu Satu tahun. Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek Kabupaten Bandung juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Tahun 2026. Adapun fungsi dari Renja tahun anggaran 2026 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja pada tahun anggaran 2024 bagi BPBD,

sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Demikian Dokumen Rencana Kerja BPBD tahun 2026 kami susun sebagai bahan acuan lebih lanjut dalam pelaksanaannya.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung

UKA SUSKA PUJI UTAMA

Disahkan Oleh:
Bupati Bandung,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA